

Presiden Sebut Perlu Sistem Kerja Hibrida Kurangi Polusi Jabodetabek

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).

Jokowi mengatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk.

Pada Sabtu (12/8), kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 atau masuk kategori tidak sehat. Menurut Jokowi, kemarau panjang hingga penggunaan



Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).

sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek. "Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," katanya.

Dalam jangka pendek, dia pun memerintahkan Kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk melakukan intervensi agar kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Intervensi tersebut, tambah Jokowi, seperti rekayasa

cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di wilayah Jabodetabek.

Jokowi juga memerintahkan agar ruang terbuka hijau (RTH) diperbanyak di daerah

Jabodetabek. Dia pun meminta agar segera disiapkan anggaran penyediaan RTH. Dalam jangka menengah, Pemerintah akan konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal. Dalam jangka panjang, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu diperkuat. "Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek dan mengedukasi publik yang seluas-luasnya," ujar Jokowi. (ANTARA)

MENJAGA PERDAMAIAN DI ASIA TENGGARA

Indonesia bertekad menjaga perdamaian, kestabilan dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara selama memegang ketuanya ASEAN 2023 dengan mendorong kerja sama kolektif seluruh anggota ASEAN.

ISU PENTING

- Geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
- Toleransi dan keberagaman.
- Perkembangan persenjataan global.
- Peredaran narkoba.
- Pelindungan hak asasi manusia (HAM).

PERINGKAT PERDAMAIAN GLOBAL 2023
Data Institute for Economics and Peace (IEEP), Juni 2023

ARAH KEBUJUKAN

- Menerapkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai panduan keterlibatan ASEAN di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia.
- Menjaga hubungan dengan mitra di luar ASEAN untuk mempromosikan dialog dan kerja sama.
- Meningkatkan kepercayaan antara anggota ASEAN dan mencegah peningkatan konflik di Laut Cina Selatan.
- Memperkuat penerapan perjanjian damai Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).
- Berkomitmen menjadi kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.
- Meningkatkan koordinasi dalam menangani peredaran narkoba dan berkomitmen menjadi kawasan bebas narkoba.
- Mempromosikan perlindungan HAM melalui implementasi Rencana Kerja Lima Tahun 2023-2025.

PERINGKAT DARI 163 NEGARA:

- Myanmar: 145
- Laos: 46
- Filipina: 115
- Kamboja: 73
- Vietnam: 41
- Thailand: 92
- Malaysia: 119
- Singapura: 6
- Indonesia: 53

KETERANGAN:

- Peringkat dari 163 negara.
- Brunei Darussalam tidak masuk dalam negara yang dianalisis.

SAYA YAKIN MASYARAKAT ASEAN MAMPU MENJADI KATALISATOR PERDAMAIAN DUNIA, MENJADI A CARING AND SHARING COMMUNITY, BUKAN HANYA EPICENTRUM OF GROWTH, TETAPI JUGA EPICENTRUM OF HARMONY YANG MENJAGA STABILITAS KAWASAN DAN PERDAMAIAN.

Presiden Joko Widodo

HOTLINE ANTARA 0812-8825-9462

KEMENTERIAN PUPR:

Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 38,1 Persen

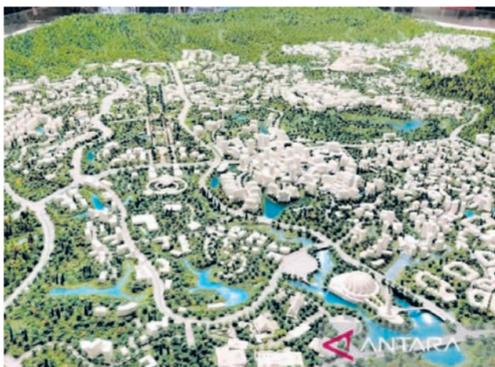
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengatakan progres capaian pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur mencapai 38,1 persen.

"Status total progres pembangunan IKN untuk gelombang (batch) pertama per 3 Agustus mencapai 38,1 persen," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga kepada ANTARA di Jakarta, Senin (14/8).

Danis menambahkan, pembangunan IKN gelombang pertama meliputi proyek-proyek yang pembangunannya dimulai dari tahun 2021, seperti pembangunan Jalan Tol Akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden.

Selain gelombang pertama, Kementerian PUPR juga melaksanakan pembangunan IKN gelombang kedua. Gelombang kedua meliputi proyek-proyek yang penandatanganan kontraknya dimulai pada April - Mei 2023 seperti gedung kementerian koordinator 2 dan rumah rusun ASN IKN.

Sebagai informasi, Ibu Kota Negara Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.



Maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kementerian PUPR, Jakarta.

Visi IKN sebagai smart forest city menjadi panduan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan aspek lingkungan.

Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). IKN Nusantara nantinya akan memiliki 70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik, dan pengurangan suhu 2 derajat.

Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya di Kompleks IKN diprediksi hanya membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan. (ANTARA)

Bersepeda dan Berbudaya Melalui Gowes Culturide



LANGIT masih gelap dan matahari pun belum menampakkan kerupawanan sinarnya, namun terlihat hiruk pikuk sejumlah orang yang sibuk mempersiapkan sepedanya. Pagi itu sebanyak 100 pesepeda yang terdiri dari atlet, komunitas, penggiat, dan influencer dari Qatar dan Indonesia berkumpul di Benteng Vredebrug, Yogyakarta. Mereka bakal menyusuri rute dan jalanannya yang sarat dengan sejarah dan budaya bangsa Indonesia dalam kegiatan Culturide Qatar-Indonesia 2023.

Benteng Vredebrug, bangunan histori sejak zaman pemerintah kolonial Belanda yang berada di pusat Kota Yogyakarta menjadi penyaksi sejarah pelepasan ratusan pegawai yang akan mengayuh sepedanya sepanjang 93 km. Culturide menyajikan sebuah selebrasi budaya, sejarah dan toleransi beragama yang dibalut

dalam kegiatan olahraga bersepeda. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Qatar-Indonesia 2023 Year of Culture sebagai upaya pemererat kerja sama antara Qatar dengan Indonesia melalui jalur budaya.

Bendera start telah dikibarkan, petualangan mereka pun dimulai dari Vredebrug menuju tujuan akhir di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di sepanjang perjalanan pesepeda menyusuri jalanan di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Mulai dari jalan dengan nuansa perkotaan hingga pedesaan, dari jalan lurus, berkelok, menanjak serta menurun terjal menjadi menu santapan para pegawai.

Berbagai kemegahan dari pemandangan alam pun menjadi daya tarik bagi pesepeda. Mereka menikmati hamparan

sawah yang luas saat melintasi daerah Kulon Progo, DI Yogyakarta. Kelelahan selama perjalanan sedikit terobati saat menyaksikan panorama yang pesajai.

Di tengah menikmati jalanan pedesaan yang asri dan kerahaman warga, semangat pesepeda kembali bergelora tatkala rombongan pegawai hampir mencapai titik akhir perjalanan di Candi Borobudur. Menjelang garis finis para pesepeda disambut dengan pertunjukan tari pengiring yang menambah daya juang untuk segera menuju titik akhir. Satu persatu pesepeda pun mencapai garis finis di kawasan Candi Borobudur dan medali finisher pun disematkan kepada para pegawai yang berhasil menyelesaikan perjalanan mereka dalam Culturide Qatar-Indonesia 2023.

Foto dan teks: Sigid Kumiawan, Hendra Nurdiansyah, Mohammad Ayudha

ARTIKEL

Oleh: Nusarina Yulianti

Inflasi Diapresiasi, Dampak El Nino Perlu Diantisipasi

PEMERINTAH telah mengumumkan angka inflasi Juli 2023. Angka yang melegakan sehingga menuai apresiasi. Namun apresiasi itu tidak boleh membuat lengah karena El Nino di depan mata. Sebuah riset membuktikan pengaruh El Nino bisa mendorong inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi pada Juli 2023 mencapai angka 3,08 persen year-on-year (yoy). Angka itu turun dibandingkan Juni 2023 yang sebesar 3,52 persen yoy.

Angka yang dirilis tersebut membuahkin apresiasi. Banyak kalangan, terutama pengamat ekonomi, yang menyatakan penurunan itu tidak lepas dari upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dengan ketat menjaga laju inflasi di daerah agar lebih terkendali. Pemerintah daerah juga mendapatkan insentif.

Anggaran 2023. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut diatur ketentuan bahwa insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi akan dialokasikan dalam tiga periode supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor, kinerjanya dapat langsung diapresiasi, dan penggunaannya pun bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode berikutnya.

Latar belakang insentif, antara lain, agar inflasi tetap dijaga. Inflasi rendah itu berharga bagi masyarakat. Setidaknya memengaruhi kesejahteraan masyarakat, memengaruhi pencapaian masyarakat untuk berbagai indikator pembangunan kesejahteraan, seperti kualitas sumber daya manusia dan juga dari sisi meningkatkan kepastian ekonomi. Yang paling penting adalah harga stabil, tetapi juga kesejahteraan masyarakat bisa terus menjadi lebih baik.

Masih terkait insentif, dalam periode pertama telah ditetapkan 33 daerah penerima alokasi insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi. Alokasi ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 271 tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 Periode



Warga mencari ikan saat melintas di samping beton pemecah arus air sungai di Bendungan Colo, Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (29/7/2023). Menghadapi El Nino, sumber air seperti waduk dan embun perlu dijaga untuk kebutuhan konsumsi dan pertanian.

Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Alokasi tersebut sebesar Rp330 miliar diberikan kepada 33 daerah yang terdiri atas 24 kabupaten, 6 kota, dan 3 provinsi terbaik. Untuk memperoleh insentif tersebut diperlukan penilaian yang didasarkan pada pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, kepatuhan dalam penyampaian laporan secara harian, stabilitas harga pangan yang diukur melalui indeks pengendalian harga, dan percepatan realisasi belanja yang khusus mendukung kegiatan pengendalian inflasi di daerah.

Itulah upaya yang dilakukan oleh Kemendagri. Namun begitu, Mendingri Muhammad Tito Kamavian tetap mengingatkan bahwa di balik tren angka inflasi yang semakin baik terdapat ancaman yang perlu diantisipasi, di antaranya El Nino. Pemda juga diminta mewaspadai ancaman kekeringan yang dipicu oleh fenomena alam El Nino. Fenomena tersebut juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Daerah-daerah diminta untuk betul-betul melihat data ini dan kemudian mempersiapkan diri.

Presiden Jokowi telah memberi-

kan sejumlah arahan yang dapat dipedomani oleh pemda. Pedoman itu mencakup mempersiapkan cadangan air, terutama di daerah yang memiliki waduk atau embung. Dalam konteks tersebut, pemda dapat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain itu, Presiden juga meminta Pemerintah Pusat menyiapkan cadangan air, baik untuk dikonsumsi masyarakat maupun untuk pertanian dan perkebunan. Upaya tersebut untuk mencegah gagal panen yang kemudian berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Langkah antisipasi diperlukan mengingat dampak El Nino tidak main-main. Siklus El Nino berpotensi mengancam ketahanan pangan. Siklus ini diproyeksikan terjadi pada Agustus hingga September 2023.

Ancaman El Nino ditengarai pengamat ekonomi makro dapat menyebabkan sejumlah jenis inflasi di antaranya imported inflation dan cost push. Imported inflation adalah inflasi naik ke harga impor. Ketika harga impor meningkat, harga semua barang dan jasa ikut naik.

Cost push inflation terjadi manakala kegiatan produksi dalam negeri menurun sehingga harga produk tersebut meningkat. Dua jenis inflasi ini diprediksi para analis dan pengan-

mat ekonomi segera terjadi dan mulai terasa dampaknya dalam beberapa bulan ke depan.

Pekan lalu, Lembaga Oseanografi dan Atmosfer AS, NOAA, memprediksi bahwa pengaruh El Nino sudah terasa dan diperkirakan "menkuat secara perlahan" dalam 6 hingga 9 bulan ke depan. Dampaknya adalah maraknya cuaca ekstrem di belahan Bumi selatan. Seberapa besar dampaknya? Ini sebuah contoh. Riset oleh Dartmouth College menemukan, musim El Nino 1982-83 dan 1997-98 menyusutkan produk domestik bruto di Amerika Serikat sebesar 3 persen pada 1988 dan 2003.

Kerugian juga menimpa sektor pertanian di Peru dan Indonesia yang menyumbang 15 persen terhadap PDB. Di kedua negara itu, dampak El Nino memangkas pertumbuhan sebesar 10 persen di sektor pertanian pada 2003.

Sebuah pemodelan statistik oleh Bloomberg Economics pekan lalu menyebutkan musim El Nino sebelum ini memperkuat inflasi bagi komoditas non-energi sebanyak empat persen. Angka inflasi ditaksir 0,75 persen lebih besar di Amerika Selatan dan 0,5 persen di Asia Tenggara dan Selatan pada musim El Nino. Itulah alasan mengapa El Nino harus diantisipasi dengan baik. Karena, sebagai apa pun pengendalian inflasi, hasilnya akan lenyap jika langkah mengantisipasi dampak El Nino.***